



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AMIR MAHMUD
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 147350

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.592.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/160 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
2. Tanah Seluas 197 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 492.500.000
3. Tanah Seluas 127 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **918.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX V HYBRID Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **28.750.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	791.339.760
F. HARTA LAINNYA	Rp.	35.000.000
Sub Total	Rp.	3.365.589.760
III. HUTANG	Rp.	556.692.406
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.808.897.354

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.